



Pengaruh Akuntabilitas Dana Desa dan Pelayanan Kantor Desa Sukaratu saat Pandemi Covid-19 terhadap Kepuasan Masyarakat

Bahar Sudewo Aji¹; Novie Susanti Suseno²; Irma Rosmayati³

¹ Universitas Garut

24022116200@fekon.uniga.ac.id

² Universitas Garut

novie_ss@yahoo.com

³ Universitas Garut

irma.rosmayati@uniga.ac.id

Abstrak

Pada masa pandemi covid-19, semua sektor terganggu. Salah satunya sistem anggaran dan pelayanan hingga pada tingkat desa, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akuntabilitas dana desa dan pelayanan kantor terhadap kepuasan masyarakat pada Desa Sukaratu di Kabupaten Garut. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 84 responden kemudian penelitian ini menggunakan data primer dengan menyebarkan kuesioner terhadap unit organisasi tingkat desa dan melakukan wawancara terhadap BPD dan perangkat desa di Sukaratu. Metode penelitian yang digunakan adalah Kuantitatif deskriptif berdasarkan hubungan variabel terhadap obyek yang bersifat sebab/ Variabel X dan akibat Variabel Y (kausal) kemudian teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Studi kepustakaan, kuesioner dan diperkuat dengan observasi dan wawancara, sedangkan teknik pengolahan data menggunakan analisis regresi linier berganda dan koefisien determinasi dengan bantuan software SPSS (*Statistical Package Social Science*) versi 26. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, data menunjukkan bahwa secara parsial maupun simultan akuntabilitas dana desa dan pelayanan kantor desa berpengaruh terhadap kepuasan masyarakat saat pandemi covid-19 di Desa Sukaratu Banyuwesmi Garut.

Kata kunci: Akuntabilitas, Covid-19, Dana Desa, Kepuasan Masyarakat, Pelayanan Publik.

Abstract

During the Covid-19 pandemic, all sectors were disrupted. One of them is the budget and service system down to the village level. This study aims to determine the accountability of village funds and office services to community satisfaction in Sukaratu Village in Garut Regency. The sample in this study was 84 respondents. Then this study used primary data by distributing questionnaires to village-level organizational units and conducting interviews with BPD and village officials in Sukaratu. The research method used is descriptive quantitative based on the relationship of variables to objects that are cause/variable X and effect variable Y (causal) then the data collection techniques used are literature study, questionnaire,

and reinforced by observation and interviews, while data processing techniques use regression analysis. Multiple linearities and coefficient of determination with the help of SPSS (Statistical Package Social Science) software version 26. Based on the results of the research conducted by the author, the data show that partially and simultaneously the accountability of village funds and village office services affects community satisfaction during the Covid-19 pandemic in the village. Sukaratu Banyuwangi Garut.

Keyword: *Accountability, Community Satisfaction, Covid-19, Public, Service, Village Fund.*

1 Pendahuluan

Dewasa ini dunia sedang dihadapkan pada bencana non alam berupa wabah penyakit yaitu Covid-19. Data Penyebaran covid-19 di Indonesia hingga Juni 2021 sebanyak 2.156.465 kasus positif, 228.835 kasus reaktif, 1.869.606 telah sembuh dan 58.024 meninggal (covid19.go.id, 2021). Banyak aspek yang sangat dirugikan salah satunya sektor public hingga ke tingkat pemerintahan paling bawah yaitu desa, telah terjadi perubahan regulasi dengan terbitnya Permendes PDTT Nomor. 6 tahun 2020 dengan pokok perubahan yang dimaksud ialah mengatur penggunaan dana desa tahun 2020 untuk: (1) Pencegahan dan penanganan Covid-19; (2) Padat Karya Tunai Desa; (3) Bantuan Langsung Tunai Desa. Maka dengan itu pemerintahan desa harus dengan baik menjalankan roda pemerintahan. Menurut (Sujarweni, 2015) Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu tuntutan masyarakat yang harus dan dapat dipenuhi, Salah satu pilar tersebut yaitu akuntabilitas.

Menurut Permana (2020) selaku sekretaris BPD desa Sukaratu tantangan yang pemerintahan desa dan masyarakat hadapi sangat berat, terjadi masalah yang terjadi di semua sektor akibat pandemi covid-19 khususnya sektor public seperti pelayanan public terganggu dan beberapa dihentikan, pembangunan infrastruktur maupun sumber daya manusia terhambat yang mana sesuai permendes PDTT Nomor 6 tahun 2021 penggunaan dana desa dialihkan untuk penanggulangan pandemi covid-19, berikut ini data RKP Desa Sukaratu sebelum dan setelah adanya regulasi permendes PDTT No.6 tahun 2020/pandemic covid-19:

Tabel 1: RKP Desa 2020 sebelum pandemi Covid-19

RKPDesa Sebelum Pandemi		Lokasi (RT/RW/Dusun)	Sasaran/ Manfaat	Perkiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan
Bidang	Jenis Kegiatan			Jumlah (Rp)
Pembangunan Desa	Pembangunan Rabat Beton	Rw.06-rw 07	Masyarakat	Rp 191.671.000
	Pembangunan lanjutan Hotmix	Rw 05 /rw 04	Masyarakat	Rp 246.000.000
	Pelaburan Aspal Kp.Sompok - Kp.Koromoy	Rw.04 s/d rw 03	Masyarakat	Rp 120.000.000

RKPDesa Sebelum Pandemi		Lokasi (RT/RW/Dusun)	Sasaran/ Manfaat	Perkiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan
Bidang	Jenis Kegiatan			Jumlah (Rp)
	pemeliharaan jalan lingkungan pemukiman/gang(Gorong gorong)	seluruh RW	Masyarakat	Rp 110.000.000
	sarana prasarana pembangunan wisata	Desa	Masyarakat	Rp 400.000.000
	Lanjutan Gapura	Kantor Desa	Masyarakat	Rp 50.393.000
	Pengurangan	Kp.Jolok Pari	Masyarakat	Rp 20.000.000
	Pembangunan Rehab Kantor Desa	Desa	Desa	Rp 86.800.000
				Rp 1.224.864.000
Pembinaan Masyarakat	Operasional LPMD	Desa	LPMD	Rp 5.000.000
	Operasional Tim Penggerak PKK	Desa	PKK	Rp 7.000.000
	Operasional Karang Taruna	Desa	Karang Taruna	Rp 1.500.000
	Operasional Linmas	Desa	Linmas	Rp 2.391.000
	Operasional MUI dan Insentif Guru Ngaji	Desa	MUI	Rp 3.000.000
	Pengadaan Kendaraan MUI	Desa	MUI	Rp 16.582.900
	Insentif Mitra Cai	Desa	Mitracai	Rp 2.000.000
	Insentif Dan Operasional Posyandu	Desa	Posyandu	Rp 36.000.000
	Operasional Posyandu	Desa	Posyandu	Rp 21.000.000
	Stunting			Rp 24.000.000
				Rp 118.473.900
Pemberdayaan Masyarakat	Pemberdayaan Guru ngaji	Desa	Guru Ngaji	Rp 9.000.000
	Tutor Paud	Desa	Guru Paud	Rp 7.000.000
	Pemeliharaan fasilitas pengelolaan sampah desa/ pemukiman	Desa	Desa	Rp 80.000.000

RKPDesa Sebelum Pandemi		Lokasi (RT/RW/Dusun)	Sasaran/ Manfaat	Perkiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan
Bidang	Jenis Kegiatan			Jumlah (Rp)
	pelatihan LPM	Desa	Desa	Rp 8.500.000
	Pelatihan Perangkat Desa	Desa	Desa	Rp 7.000.000
	Pelatihan BPD	Desa	Desa	Rp 5.500.000
	Pelatihan Pengelola Wisata	Desa	Desa	Rp 6.000.000
	Pelatihan hansip dan pengadaan atribut lengkap	Desa	Desa	Rp 10.000.000
	Pelatihan Pengelola Bumdes	Desa	Desa	Rp 10.000.000
	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembahasan (Musdes, Musrenbangdes/Pra- Musrenbangdes, Bersifat reguler)	Desa	Desa	Rp 4.329.000
	Penyusunan dokumen perencanaan desa (RPJMDes/RKPDDes,dll)	Desa	Desa	Rp 4.000.000
				Rp 151.329.000
	Penerimaan Pembiayaan			
	Penyertaan Modal			Rp 300.000.000

Tabel 2: Tabel RKP Desa 2020 saat pandemi Covid-19

RKPDesa Saat Pandemi Covid-19		Lokasi (RT/RW/Dusun)	Sasaran/ Manfaat	Perkiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan
Bidang	Jenis Kegiatan			Jumlah (Rp)
Pembangunan Desa	Pembangunan Rabat Beton	Rw.06-rw 07	Masyarakat	Rp 191.671.000
	Pembangunan lanjutan Hotmix	Rw 05 /rw 04	Masyarakat	Rp 246.00.000
	penanggulangan Covid 19	seluruh RW	Masyarakat	Rp 110.000.000

RKPDesa Saat Pandemi Covid-19		Lokasi (RT/RW/Dusun)	Sasaran/ Manfaat	Perkiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan
Bidang	Jenis Kegiatan			Jumlah (Rp)
	sarana prasarana pembangunan wisata	Desa	Masyarakat	Rp 400.000.000
	Lanjutan Gapura	Kantor Desa	Masyarakat	Rp 53.222.000
	Padat Karya Tunai (PKT)			Rp 15.500.000
	Pembangunan Rehab Kantor Desa	Desa	Desa	Rp 86.800.000
				Rp 1.103.193.000
Pembinaan Masyarakat	Operasional LPMD	Desa	LPMD	Rp 5.000.000
	Operasional Tim Penggerak PKK	Desa	PKK	Rp 7.000.000
	Operasional Karang Taruna	Desa	Karang Taruna	Rp 1.500.000
	Operasional Linmas	Desa	Linmas	Rp 2.391.000
	Operasional MUI dan Insentif Guru Ngaji	Desa	MUI	Rp 3.000.000
	Pengadaan Kendaraan MUI	Desa	MUI	Rp 16.582.900
	Insentif Mitra Cai	Desa	Mitracai	Rp 2.000.000
	Insentif Dan Operasional Posyandu	Desa	Posyandu	Rp 36.000.000
	Operasional Posyandu	Desa	Posyandu	Rp 21.000.000
				Rp 94.473.900
Pemberdayaan Masyarakat	Pemberdayaan Guru ngaji	Desa	Guru Ngaji	Rp 9.000.000
	Tutor Paud	Desa	Guru Paud	Rp 7.000.000
	Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Covid-19	Desa	Desa	Rp 70.000.000
	BLT DESA			Rp 331.017.900
				Rp 417.017.900
	Penerimaan Pembiayaan			
	Penyertaan Modal			Rp 179.982.100

Berdasarkan pada tabel RKPDes di atas dapat dilihat bahwa terjadi beberapa perubahan mulai dari Pembangunan, Pembinaan masyarakat maupun pemberdayaan masyarakat, semua anggaran tersebut dihentikan dan dialokasikan untuk penanggulangan pandemi covid-19 sesuai permendes PDTT No.6 tahun 2021, maka roda pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Mardiasmo (2002) dalam Maani (2009) akuntabilitas itu menyangkut pertanggungjawaban kepada masyarakat atas setiap aktivitas yang dilakukan. Ketika sebuah akuntabilitas yang akuntabel terlaksana, maka istilah "*power tend to corrupt*" bisa dihindari. Hal tersebut dapat dijalankan dengan cara pengendalian internal, mekanisme akuntabilitas keuangan negara, kemudian transparansi atas kegiatan pengadaan barang dan jasa (Kipnis, 1972).

Menurut Anwar (2020) akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa, kebijakan desa, dan kelembagaan desa berpengaruh secara bersama-sama terhadap kesejahteraan masyarakat. Pendekatan kesejahteraan dapat di tempuh berdasarkan dua aspek (Campbell, 1976; Milligan & Conradson, 2006), yaitu: 1) kesejahteraan subjektif dan 2) kesejahteraan objektif. Kesejahteraan ditujukan bagi tingkat individu, keluarga, dan masyarakat. Pada tingkat individu, perasaan Bahagia atau sedih, kecemasan maupun kedamaian jiwa, kemudian ketidakpuasan ataupun kepuasan merupakan indikator subjektif dari kualitas hidup.

Kepercayaan publik dapat diartikan ketika masyarakat percaya jika pemerintah baik, jujur dan dapat bertanggungjawab tatkala menjalankan tugas dan fungsinya sebagai aparatur negara (Susliyanti & Binawati, 2020). kemudian kepercayaan masyarakat akan tumbuh tatkala masyarakat merasa puas dengan pemerintahan (Fard & Rostamy, 2007).

Menurut Siti Maryam (2017) *good governance* mampu mengembalikan dan membangun kembali kepercayaan publik terhadap pemerintah, kemudian Akuntabel dan terciptanya *Public service* yang berkualitas merupakan salah satu bentuk *good governance*. Konsep *good governance* muncul dilandaskan atas tumbuhnya ketidakpuasan pada kinerja pemerintahan yang selama ini dipercaya sebagai pemangku kebijakan. Memuaskan masyarakat dan pencapaian keputusan merupakan tujuan dari pelayanan publik (Basyriah et al., 2020).

Penelitian ini sejalan dengan Alfionita & Gunawan (2020) bahwa terdapat pengaruh antara kualitas layanan dan kepuasan masyarakat. Kemudian (Pamungkas et al., 2020) menyatakan Penggunaan Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT-Dana Desa) di Kabupaten Sumbawa mampu mengakomodir sebanyak 24.772 Kepala Keluarga penerima bantuan. menurut (Siti Maryam, 2017) Esensi pemerintahan yang berkualitas dapat diamati dengan terselenggaranya sebuah pelayanan publik yang baik, hal ini sejalan dengan esensi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang diperuntukan untuk memberikan kebebasan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat dan meningkatkan pelayanan publik

Sehubung dengan pelaksanaan UU Desa terutama Permendesa PDTT 6 tahun 2020, apakah akuntabilitas mengenai dana desa telah sesuai dengan standar pelayanan .dan mempunyai dampak positif atau hanya mengikuti saran peraturan-peraturan yang sudah ada tanpa mengindahkan peningkatan manajemen sebuah pelayanan, yaitu upaya penyempurnaan dan evaluasi dari sistem dan prosedur terhadap proses bisnis internal pada unit pelayanan, yang terdiri dari indikator penilaian.

2 Tinjauan Pustaka

2.1 Akuntabilitas Publik

Mardiasmo (2002) dalam Anwar (2020) mengemukakan bahwa akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang Amanah (*Agent*) untuk dapat melakukan pertanggungjawaban, menyerahkan dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang mana *Principal* tersebut memiliki hak dan kewenangan untuk memperoleh pertanggungjawaban tersebut.

2.2 Pelayanan Kantor Desa

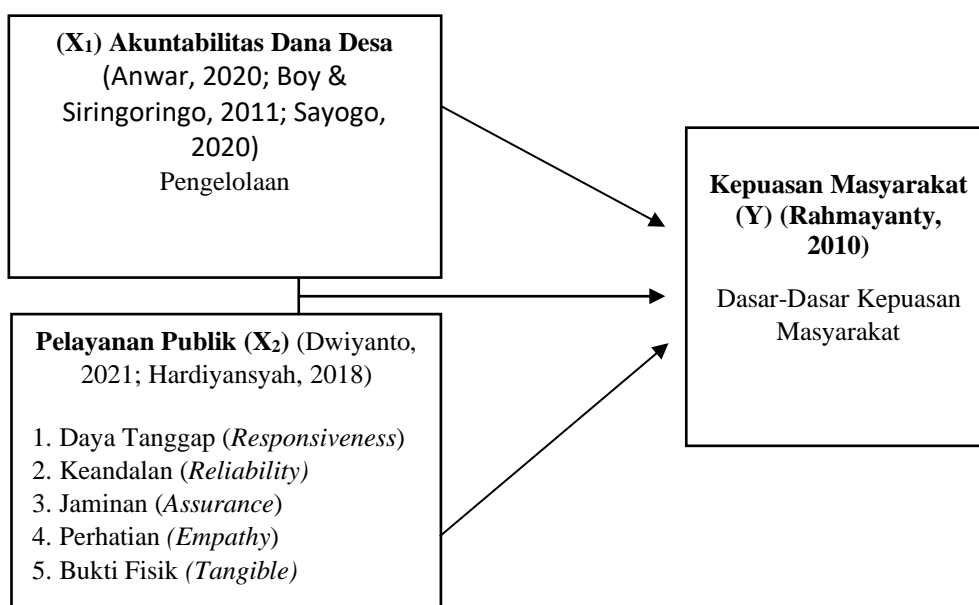
Menurut Anisa (2018) pemerintah dituntut untuk dapat memberikan barang dan jasa (pelayanan) yang ekonomis, efektif, efisien juga akuntabel untuk seluruh masyarakat yang membutuhkan. Pemberian pelayanan publik dari aparatur pemerintah kepada rakyat sebetulnya merupakan implikasi dari fungsi aparat negara sebagai abdi dan pelayan masyarakat. Dalam situasi masyarakat yang dewasa ini semakin kritis dan tajam, sistem birokrasi publik dituntut untuk bisa mengubah peran juga posisi tatkala memberikan pelayanan publik. Dari yang suka mengatur dan memerintah, saat ini harus berubah menjadi suka melayani, kemudian dari semula menggunakan pendekatan kekuasaan berubah, harus bisa menjadi suka menolong tanpa diskriminatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Kualitas pelayanan *serviqual* menurut (Parasuraman et al., 2002) dalam Tanyo (2016) yaitu *tangibles, realibility, responsiveness, assurance dan emphaty*.

2.3 Kepuasan Masyarakat

Kepuasan pelayanan menurut Kepmenpan No Kep/25/M/Pan/M.2014 adalah hasil pendapat dan penilaian pada kinerja pelayanan yang diberi oleh aparatur penyelenggara pelayanan publik. Secara umum, kepuasan dapat diartikan sebagai adanya kebersamaan antara kinerja produk dan pelayanan yang diterima dengan kinerja produk dan pelayanan yang diharapkan pengguna (masyarakat).

2.4 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran pengaruh akuntabilitas dana desa saat pandemi covid-19 terhadap kepuasan masyarakat (studi kasus pada Desa Sukaratu Kec Banyuresmi Garut) dapat diilustrasikan pada bagan kerangka berpikir, sebagaimana gambar 1 berikut :



Gambar 1: Kerangka pemikiran

Pengaruh akuntabilitas dana desa saat pandemic Covid-19 terhadap kepuasan masyarakat.

H_0 : Tidak terdapat pengaruh akuntabilitas dana desa saat pandemi Covid -19 terhadap kepuasan masyarakat.

H_1 : Terdapat pengaruh akuntabilitas dana desa saat pandemi Covid -19 terhadap kepuasan masyarakat.

3 Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif dengan pendekatan metode kuantitatif dengan diperkuat oleh data wawancara dan observasi. Pengambilan sampel dilakukan dengan purposive sampling yaitu memilih sampel sesuai kriteria yang sudah ditentukan dengan beberapa pertimbangan. Sampel dalam penelitian adalah masyarakat di Desa Sukaratu Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Garut. Kriteria sampel yang digunakan adalah masyarakat yang ada dalam unit organisasi tingkat (Lembaga Kemasyarakatan Desa) desa yang terlibat langsung dalam penyusunan dan atau pelaksanaan dan atau pelaporan dana desa (RW, tokoh adat, tokoh masyarakat, unsur kelembagaan desa, Posyandu, PKK, Karang Taruna, LPM, MUI Desa,) di Desa Sukaratu sebanyak 84 responden.

4 Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dari 40 butir pertanyaan yang disebar pada 84 responden, tingkat partisipasi responden sebesar 100% (Menjawab semua), Kemudian sebanyak 18 butir pertanyaan wawancara, partisipasi responden sangat kooperatif dan transparan sesuai dengan bukti pendukung seperti dokumentasi dan observasi lapangan. Berdasarkan data diatas yang diolah pemerintahan desa telah akuntabel sesuai dengan regulasi yang ditekankan dalam Permendes PDTT Nomor 11 tahun 2020 bahwa prioritas dana desa dialihkan untuk alokasi bantuan langsung tunai, padat karya dan satgas Covid-19. Kemudian dalam pelayanan yang diberikan pemerintah desa telah maksimal sampai dengan menyediakan pelayanan online via whatsapp Ketika terjadi Pembatasan sosial berskala besar

(PSBB) dan banyak terganggu akibat aturan yang harus diterapkan dari pemangku kebijakan. Untuk mengukur keterdukungan hipotesis, maka dilakukan pengujian sebagai berikut:

Analisis Koefisien Korelasi

Tabel 3: Model *summary*

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.821 ^a	.674	.666	3.088

a. Predictors: (Constant), Kualitas Pelayanan, Akuntabilitas

b. Dependent Variable: Kepuasan Masyarakat

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa antara variabel bebas dan variabel terikat memiliki hubungan satu sama lain. Berdasarkan tabel 4,26 didapatkan nilai R sebesar 821, nilai R ini adalah nilai koefisien korelasi. Dimana nilai 0,821 masuk dalam kategori hubungan yang sangat kuat.

Analisis Determinasi

Tabel 4: Model *summary*

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.821 ^a	.674	.666	3.088

a. Predictors: (Constant), Kualitas Pelayanan, Akuntabilitas

b. Dependent Variable: Kepuasan Masyarakat

Dari hasil output didapatkan angka (R²) sebesar 0,666 hal ini berarti variasi pada variabel kepuasan masyarakat dapat dijelaskan oleh variabel akuntabilitas dana desa (X1) dan kualitas pelayanan (X2) sebesar 66,6% sedangkan sisanya sebesar 33,4% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Pengujian Hipotesis secara parsial (Uji t)

Tabel 5: *Coefficients*

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.160	4.419		.262	.794
	Akuntabilitas	.677	.097	.556	6.948	.000
	Kualitas Pelayanan	.360	.081	.355	4.433	.000

a. Dependent Variable: Kepuasan Masyarakat

Pengaruh Akuntabilitas Dana Desa Terhadap Kepuasan Masyarakat

Berdasarkan hasil perhitungan statistika menggunakan uji-t maka diperoleh hasil t hitung > t tabel, jika disubstitusikan maka 6,948 > 1,9893 maka Ho ditolak, yang artinya terdapat pengaruh akuntabilitas dana desa saat pandemi Covid -19 terhadap kepuasan masyarakat. Maka berdasar pada nilai unstandardized coefficient pada akuntabilitas dana desa terhadap kepuasan kerja adalah

sebesar +0,677 maka dapat diketahui bahwa pengaruhnya memiliki arah yang positif. Kemudian didapatkan nilai Sig < α atau $0,024 < 0,05$ artinya memiliki pengaruh yang signifikan.

Pengaruh Pelayanan Kantor Desa Terhadap Kepuasan Masyarakat

Berdasarkan hasil perhitungan statistika menggunakan uji-t maka diperoleh hasil t hitung > t tabel, jika disubstitusikan maka $4,433 > 1,9893$ maka H_0 ditolak, yang artinya terdapat pengaruh pelayanan kantor desa saat pandemi Covid -19 terhadap kepuasan masyarakat. Maka berdasar pada nilai unstandardized coefficient pada akuntabilitas dana desa terhadap kepuasan kerja adalah sebesar +0,36 maka dapat diketahui bahwa pengaruhnya memiliki arah yang positif. Kemudian didapatkan nilai Sig < α atau $0,00 < 0,05$ artinya terdapat pengaruh yang signifikan mengenai kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen.

Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji F)

Tabel 6: ANOVA

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1599.687	2	799.844	83.872	.000 ^b
	Residual	772.456	81	9.536		
	Total	2372.143	83			

a. Dependent Variable: Kepuasan Masyarakat

b. Predictors: (Constant), Kualitas Pelayanan, Akuntabilitas

Berdasarkan perhitungan statistika Uji-F Maka diperoleh hasil F hitung > F tabel sebesar $83,872 > 1,44045$ maka H_0 ditolak, artinya terdapat pengaruh simultan antara variabel akuntabilitas dana desa dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan masyarakat di Desa Sukaratu Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut. Untuk signifikansi digunakan dengan membandingkan antara nilai Sig. Dan alpha, Jika nilai Sig. < Alpha maka terdapat pengaruh yang signifikan. Didapat nilai Sig. Sebesar 0,000 dan alpha sebesar 0,05. Jadi nilai Sig. < Alpha atau $0,000 < 0,05$ maka dinyatakan terdapat pengaruh yang signifikan pada variabel X1 dan X2 terhadap Y maka dari itu model penelitian dapat dikatakan fit.

5 Simpulan dan Saran

Variabel akuntabilitas dana desa dinilai baik, dimana terdapat dua indikator yang memiliki penilaian yang sangat baik dalam variabel ini, yaitu indikator yang menyatakan bahwa penyusunan anggaran desa yang sudah sesuai dengan prinsip penganggaran, kemudian indikator yang mengukur mengenai audit yang dilakukan inspektorat dan Pemdes sudah sangat baik dilakukan untuk dapat mengetahui keberhasilan dari pelaksanaan anggaran, namun terdapat dua indikator yang dinilai masih belum maksimal diantaranya adalah indikator yang mengukur mengenai pembuatan RKP Desa yang belum berdasarkan keterkaitan antara pendanaan dan pengeluaran, dan indikator yang mengukur mengenai jumlah belanja pada penganggaran APBDes adalah batas tertinggi yang diperuntukan pada setiap pengeluaran belanja. Selanjutnya dengan menggunakan uji t diketahui bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan pada akuntabilitas dana desa terhadap kepuasan masyarakat pada saat pandemi Covid-19 maka dapat disimpulkan penelitian ini sejalan dengan (Anwar, 2020; Mardiasmo, 2002), bahwa indikator penilaian akuntabilitas dapat dinilai dengan (perencanaan, pelaksanaan, tatakelola, pelaporan dan pertanggungjawaban)

Variabel kualitas pelayanan desa dinilai baik, sejalan dengan indikator penilaian pelayanan menurut Hardiyansyah (2018). Dimana dalam penelitian ini indikator yang memiliki penilaian teratas adalah indikator yang mengukur mengenai kemampuan petugas untuk dapat memahami dan peduli dengan kebutuhan masyarakat dan indikator yang mengukur mengenai fasilitas yang dimiliki oleh Desa Sukaratu. Namun masih terdapat kekurangan pada variabel ini, yaitu pada indikator yang mengukur mengenai daya tanggapan petugas dalam memberikan informasi dan kesesuaian waktu, keramahan petugas pelayanan, perhatian terhadap masyarakat dan penerapan kesamaan hak dalam memberikan pelayanan. Dengan menggunakan uji t diketahui bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan pada kualitas pelayanan Desa Sukaratu terhadap kepuasan masyarakat pada saat pandemi Covid-19.

Dengan menggunakan uji F ditemukan bahwa terdapat pengaruh secara simultan pada variabel akuntabilitas dana desa dan pelayanan terhadap kepuasan masyarakat Desa Sukaratu pada saat pandemi Covid-19. Dengan kata lain model yang dibuat pada penelitian ini dikatakan sudah fit.

Adapun saran yang diberikan oleh penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Saran bagi pemerintah Desa Sukaratu

Dalam meningkatkan kepuasan masyarakat, pemerintahan desa harus mampu mengoptimalkan indikator dalam penelitian yang masih dinilai rendah. Diantaranya adalah dengan melakukan sinkronisasi pembuatan RKP-Desa antara pendanaan dan pengeluaran, juga mengoptimalkan pengeluaran belanja sesuai dengan batasannya. Selain itu dalam masalah kualitas pelayanan pemerintah desa harus meningkatkan daya tanggap petugas dengan menambah jumlah personil maupun evaluasi pelayanan online dalam menjalankan pelayanan kantor desa sehingga dapat mempercepat proses pelayanan, dan efisiensi waktu dalam melayani masyarakat. Selain itu perlunya ditingkatkan keandalan pelayanan, baik itu dari keramahan pelayanan, kesopanan, perhatian dan menerapkan prinsip kesamaan hak dalam memberikan pelayanan dengan melakukan pelatihan pada para petugas pelayanan untuk dapat lebih baik dalam melayani masyarakat.

2. Saran untuk peneliti selanjutnya

Saran yang kedua untuk peneliti selanjutnya, bahwa penelitian ini tak luput dari kekurangan, maka dari itu kepada peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian di era new normal ini dengan meneliti variabel lain yang belum dilakukan dalam penelitian ini secara mendalam.

Daftar Pustaka

- Alfionita, M., & Gunawan, I. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan Publik Terhadap Kepuasan Masyarakat Di Kantor Kecamatan Jayanti. *Progress*, 3(1), 1–13. Retrieved From Pengaruh Kualitas Pelayanan Publik Terhadap Kepuasan Masyarakat Di Kantor Kecamatan Jayanti, *Progress: Jurnal Pendidikan, Akuntansi Dan Keuangan (Lppm-Unbaja.Ac.Id)*
- Anisa, S. (2018). Pengaruh Pelayanan Publik Terhadap Kepuasan Masyarakat Di Kantor Desa Helvetia. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
- Anwar, M. R. (2020). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa, Kebijakan Desa, dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus pada Desa di Kecamatan Pati Kabupaten Pati). Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Basyriah, U., Putri, A., & Hasannah, Z. N. (2020). Inovasi Pelayanan Publik di Kantor Desa Landungsari. *Prosiding Simposium Nasional Tantangan Penyelenggaraan Pemerintahan Di Era Revolusi Industri 4.0*, 440–463.

- Boy, D., & Siringoringo, H. (2011). Analisis pengaruh akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja sekolah (APBS) terhadap partisipasi orang tua murid. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 14(2).
- Campbell, A. (1976). *Subjective measures of well-being*. *American Psychologist*, 31(2), 117.
- covid19.go.id. (2021). Data Covid-19 di Indonesia per Juni 2021. H
- Dwiyanto, A. (2021). Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik. UGM PRESS.
- Fard, H. D., & Rostamy, A. A. A. (2007). *Promoting public trust in public organizations: Explaining the role of public accountability*. *Public Organization Review*, 7(4), 331–344.
- Hardiyansyah, H. (2018). Kualitas Pelayanan Publik: Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya. Gava Media.
- Kipnis, D. (1972). *Does power corrupt?* *Journal of Personality and Social Psychology*, 24(1), 33.
- Maani, K. D. (2009). Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pelayanan Publik. *Jurnal Demokrasi*, 8(1).
- Mardiasmo, A. (2002). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah: *Good Governance, Democratization, Local Government Financial Management*. Edisi Bahasa Indonesia, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Milligan, C., & Conradson, D. (2006). *Landscapes of voluntarism: New spaces of health, welfare and governance*. Policy Press.
- Pamungkas, B. D., Suprianto, S., Usman, U., Sucihati, R. N., & Fitriyani, V. (2020). Penggunaan Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Sumbawa. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, 1(2), 96–108.
- Parasuraman, A., Berry, L., & Zeithaml, V. (2002). *Refinement and reassessment of the SERVQUAL scale*. *Journal of Retailing*, 67(4), 114.
- Permana, T. septian. (2020). Perubahan RKPDes akibat Pandemi Covid-19.
- Rahmayanty, N. (2010). Manajemen pelayanan prima. Yogyakarta: Graha Ilmu, 89.
- Sayogo, K. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Dengan Pendekatan Value For Money Pada Pemerintah Kabupaten Jombang Pada Tahun 2014-2018. Stie Pgri Dewantara.
- Siti Maryam, N. (2017). Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik. *JIPSI-Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi UNIKOM*, 6.
- Sujarweni, V. W. (2015). Akuntansi Panduan Tata Kelola Keuangan Desa. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Susliyanti, E. D., & Binawati, E. (2020). Pengaruh Akuntabilitas Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Terhadap Kepercayaan dan Kepuasan Masyarakat Atas Penggunaan Dana Desa. *Efektif Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 11(1), 1.
- Tantyo, H. (2016). Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Masyarakat (Studi Tentang Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Pada Badan pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bandung). Universitas Komputer Indonesia.